

PEMIKIRAN POLITIK IBNU KHALDUN (732 H-808 H/1332-1406 M)

Sholikhah¹ dan Ismail²

***Abstract,** This study will examine how Ibnu Khaldun's political thought (732 H-808 H), in context as one of the Islamic thinkers who have contributed to the political system that once existed in the treasures of Islamic civilization. This research includes literature review, which focuses on the object of study in a particular literature, namely the work of Ibn Khaldun. The conclusions of this study are among others; that 'ashabiyah is a certain socio-political characteristic contained in a tribe (community), and is in the village's cultural framework. Ashabiyah is the driving force of a state and is the foundation of a state or dynasty. Ashabiyah has a major role in the expansion of the country after it was the foundation of the country's upholding. If 'ashabiyah is strong, then the emerging country will be broad, on the contrary if 'ashabiyah is weak, then the area of the emerging country is relatively limited. Ashabiyah can be a tool of struggle, an instrument of attack and defense. It can also be a tool for resolving conflicts between groups, that is, if this conflict must be resolved violently. In a settled society the ultimate goal of the Ashabiyah is Mulk, authority that ultimately weakens the will to be complied with, if necessary by force. When the state or dynasty or mulk is established, he will try to destroy 'ashabiyah. Ibn Khaldun's thoughts about the state 'ashabiyah had a very significant influence on the achievement of power and political continuity. Starting from the beginning of the movement to build strength, then continue to achieve victory, even to the stage of maintaining the social stability of the country. Conversely, the waning of 'ashabiyah ties will potentially weaken the country's resilience from the onslaught of the enemy as well as from internal turmoil, and the changing times that are growing also play a role in testing and providing very heavy resistance as well. The country formed is based on 'ashabiyah, usually three generations old, which is around 120 years. One generation is calculated for a person's normal age of 40 years.*

***Keywords,** Ashabiyah, Ibn Khaldun, Politics, and Siyasa*

Pendahuluan

Ibnu Khaldun merupakan tokoh Intelektual Muslim dalam ranah ilmu politik, dimana pembahasan ini dianggap penting dan masih relevan dengan konteks zaman sekarang. Kemampuan intelektual Ibnu Khaldun telah teruji dan diakui oleh para intelektual lainnya baik kaum barat maupun timur. Kemampuan nalar yang tinggi dalam menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan membuat Ibnu Khaldun memiliki pola pikir yang berbeda dengan para pemikir (filosof) Muslim sebelumnya, seperti al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu 'Arabi, al-Ghazali dan filosof muslim lainnya. Tokoh intelektual Muslim yang satu ini dikenal sebagai filosof, sejarawan, sosiolog, ekonom, ilmuan politik, geografer, dan lainnya, namun dalam makalah singkat ini hanya membahas tentang kontribusi pemikiran politik Ibnu Khaldun.

Menurut Ibnu Khaldun, politik merupakan mekanisme yang mengajarkan manusia untuk mencapai keselamatan dunia akhirat. Dalam berpolitik, manusia dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan dirinya dari serangan luar, dan itu merupakan salah satu bentuk dari perilaku jihad. Dalam hal lain, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa terbentuknya sebuah negara menjadi penting bagi setiap masyarakat, karena salah satu

¹ STIT Makhdum Ibrahim Tuban, email: sholihah86@gmail.com

² IAIN Lhoksumawe Aceh, email: ismail@gmail.com

tugas negara adalah mensejahterakan masyarakatnya. Dalam konteks tersebut bisa digambarkan bahwa negara merupakan sebuah lembaga yang sangat tepat untuk mengatur semua urusan masyarakat dan mekanisme pemilihan pemimpin. Tanpa negara yang dipimpin dengan baik maka kehidupan masyarakat akan tidak jelas dan bisa disebutkan sebagai masyarakat anarkis. Adanya masyarakat menghendaki kepada adanya negara, hal ini dikarenakan mustahil masyarakat bisa bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karenanya, untuk melahirkan sebuah negara yang baik diperlukan perasaan persatuan, solidaritas dan nasionalisme yang kuat antar sesama dan inilah makna dari *'ashabiyyah* yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun.³

Solidaritas dan persatuan yang kuat tidak akan lahir dengan sendirinya tanpa diawali dengan sistem pemerintahan yang kuat pula. Dalam hal ini keberadaan seorang pemimpin bagi segenap masyarakat dalam membangun sebuah sistem negara sangat dibutuhkan, tanpa seorang pemimpin yang kuat, yang memiliki superioritas atau keunggulan, dan memiliki hati nurani yang baik, maka suatu negara akan goyah dan mudah hancur, karena pemimpin yang lemah akan sangat mudah dikontrol kepemimpinannya oleh orang-orang yang memiliki power dan memiliki kepentingan lain selain dari kepentingan negara, oleh karenanya Ibnu Khaldun pernah berkata “seorang pemimpin adalah cerminan dari masyarakat yang ia pimpin”. Dalam kehidupan bernegara sebuah sistem kenegaraan yang baik sangat dibutuhkan, terlebih dalam sistem hukum, karena hukum inilah yang dapat menertibkan keinginan-keinginan liar manusia dalam kehidupan bernegara.

Biografi dan Sketsa Historis Ibnu Khaldun

1. Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun lahir di Tunisia, Afrika Utara, saat 1 Ramadan 732 H atau 27 Mei 1332 M, dan wafat di Kairo pada 25 Ramadhan 808 H atau 1406 M. Beliau wafat dalam usianya yang ke-76 tahun (menurut perhitungan hijriyah) di kairo, sebuah desa yang terletak di dekat sungai Nil sekitar kota Fustath, tempat keberadaan madrasah *al-Qamhiyah* dimana sang filsuf, guru, politisi ini berkhidmat semasa hidupnya. Sampai saat ini, rumah tempat kelahiran yang terletak di jalan Turbah Bay, Tunisia, masih utuh serta digunakan untuk sekolah yaitu *Idarah 'Ulya*.

Ibnu Khaldun (1332-1406 M) merupakan sebutan populer dalam dunia akademisi yang merupakan panggilan penisbahan kepada nama kakeknya. Nama lengkapnya adalah Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrawi, dikenal juga dengan nama panggilan Waliyuddin Abu Zaid, Qadhi al-Qudrat. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia 27 Mei 1332 M. Nenek moyang Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut yang kemudian hijrah ke Sevilla (Spain) pada abad ke 14 M setelah wilayah tersebut dikuasai oleh muslim. Keluarganya yang dikenal dekat dengan dinasti Umayyah memberi kesempatan panjang dalam menduduki posisi tinggi dalam politik pemerintahan Spain samapi akhirnya hijrah ke Maroko beberapa tahun sebelum Sevilla jatuh ke penguasa Kristen.⁴

Gelar waliyudin merupakan gelar yang diberikan orang sewaktu Ibnu Khaldun memangku jabatan hakim di Mesir. Sebutan „*alamah* didepan namanya menunjukkan bahwa pemakai gelar tersebut merupakan orang yang mempunyai gelar keserjanaan tertinggi, sebagaimana gelar-gelar yang lain, seperti Rais, al-Hajib, al-Shadrul, al-Kabir, al-Faqih, al-Jalil dan Imamul A“immah, Jamal al-Islam wa al-Muslimin. Mengenal

³ Muh Sofiuddin, *Pandangan Ibnu Khaldun Tentang Manusia dan Masyarakat*, Yogyakarta. UGM, 2015, vii.

⁴ Zainal al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, Pent. Ahmad Rafi“ Usmani, (Bandung: Penerbit Putaka, 1987), 9

tambahan nama belakangnya, al-Maliki, ini dihubungkan dengan imam mazhab yang dianutnya dalam ilmu fiqh, yaitu mazhab Imam Malik bin Anas.⁵

Ibnu Khaldun memulai pendidikan di Tunisia dalam jangka waktu 18 tahun, yaitu antara tahun 1332-1350 M. Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal al-Qur'an. Seperti kebiasaan yang membudaya pada masanya, pendidikan Ibnu Khaldun dimulai pada usia yang dini, dengan pengajaran yang ketat dari guru pertamanya, yaitu orangtuanya sendiri, kemudian barulah beliau menimba berbagai ilmu dari guru-guru yang terkenal pada masanya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya, mempelajari bahasa Arab dengan sastranya, al-Qur'an dengan tafsirnya, hadis dengan ilmu-ilmunya, ilmu tauhid, fikih, filsafat dan ilmu berhitung.⁶

Ibnu Khaldun dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga ulama. Dari ayahnya ia belajar ilmu qiraat. Sementara ilmu hadits, bahasa Arab dan fikih diperoleh dari para gurunya, Abu al-Abbas al-Qassar dan Muhammad bin Jabir al-Rawi. Ia juga belajar kepada Ibn 'Abd al-Salam, Abu Abdullah bin Haidarah, al-Sibtī dan Ibnu Abd al-Muhaimin. Kemudian memperoleh ijazah hadits dari Abu al-Abbas al-Zawawi, Abu Abdullah al-Iyli, Abu Abdullah Muhammad, dan lain-lain. Ia pernah mengunjungi Andalusia dan Maroko. Di kedua negara itu ia sempat menimba ilmu dari beberapa ulama, antara lain Abu Abdullah Muhammad al-Muqri, Abu al-Qasim Muhammad bin Muhammad al-Burji, Abu al-Qasim al-Syarif al-Sibtī. Kemudian mengunjungi Persia, Granada, dan Tilimsin. Banyak tokoh dan ulama yang menjadi muridnya. Mereka antara lain Ibnu Marzuq al-Hafidz, al-Damamini, al-Busili, al-Bisati Ibnu Ammar, Ibnu Hajar, dan lain-lain. Dalam usia muda Ibnu Khaldun sudah menguasai beberapa disiplin ilmu Islam klasik, termasuk 'ulum aqliyah (ilmu-ilmu kefilosofan, tasawuf dan metafisika). Di bidang hukum, ia mengikuti mazhab Maliki. Di samping itu semua, ia juga tertarik pada ilmu politik, sejarah, ekonomi, geografi dan lain-lain.⁷

Ada beberapa guru yang berjasa dalam perkembangan intelektual Ibnu Khaldun, yaitu: Abu 'Abdullah Muhammad bin Sa'ad bin Bursal al-Anshari dan Abu al-'Abbas Ahmad bin Muhammad al-Bathani dalam ilmu al-Qur'an (*qira'at*), Abu 'Abdillah bin al-Qushshar dan Abu 'Abdillah Muhammad bin Bahr dalam ilmu gramatika Arab (bahasa Arab), Syamsuddin Muhammad bin Jabir bin Sulthan al-Wadiyasyi dan Abu Muhammad bin Abdul Muhaimin bin Abdul Muhaimin al-Hadhramy dalam ilmu hadis, Abu 'Abdillah Muhammad al-Jiyani dan Abu al-Qasim Muhammad al-Qashir dalam ilmu fikih, serta mempelajari kitab *al-Muwatta'* karya Imam Malik pada Abdullah Muhammad bin Abdussalam. Sedangkan ilmu-ilmu rasional seperti filsafat, teologi, mantik, ilmu kealaman, matematika, dan astronomi dipelajari dari Abu 'Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Abili. Ibnu Khaldun selalu mendapatkan pujian dan kekaguman dari kebanyakan guru-gurunya.⁸

2. Karya Ibnu Khaldun

Meskipun Ibnu Khaldun hidup pada masa di mana peradaban Islam mulai mengalami kehancuran atau menurut Nurkholis Madjid, pada saat umat Islam telah mengalami anti klimaks perkembangan peradabannya, namun ia mampu tampil sebagai pemikir muslim yang kreatif, yang melahirkan pemikiran-pemikiran besar yang

⁵ Wulpiah, *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar*, dalam Jurnal. Asy-Syar'iyah, Vol. 1, No. 1, 2016, 44.

⁶ Muhammad Abdullah Enan, *Biografi Ibnu Khaldun*, terj. Machnun Husein, Cet I, (Jakarta: Zaman, 2013), 32.

⁷ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 12.

⁸ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Masturi Irham, Cet. I, (Jakar: Pustaka Alqausar, 2011), 1081-1082.

dituangkan dalam beberapa karyanya, hampir seluruhnya bersifat orisinal dan kepeloporan.

Berikut ini beberapa karya Ibnu Khaldun yang cukup terkenal, antara lain:

- a. Kitab *al-'Ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi Ayyam al-A'rab wa al-'Ajam wa al-Barbar wa man 'Aasharahim min Dzawi al-Suthan al-Akbar*. Karya yang dilihat dari judulnya mempunyai gaya sajak yang tinggi ini dapat diterjemahkan menjadi; Kitab contoh-contoh dan rekaman-rekaman tentang asal-usul dan peristiwa hari-hari Arab, Persia, Barbar dan orang-orang yang sezaman dengan mereka yang memiliki kekuatan besar. Oleh karena judulnya terlalu panjang, orang sering menyebutnya dengan kitab *al-'Ibar* saja, atau kadang cukup dengan sebutan *Tarikh Ibnu Khaldun*.
- b. Kitab *Muqaddimah Ibnu Khaldun*; Dalam volume tujuh jilid, kajian yang dikandung begitu luas menyangkut masalah-masalah sosial, para Khaldunian cenderung menganggapnya sebagai ensiklopedia.
- c. Kitab *al-Ta'rif Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Garban wa Syarqan*; adalah kitab otobiografi Ibnu Khaldun secara lengkap di mana ia dipandang sebagai orang besar abad pertengahan yang paling sempurna meninggalkan riwayat hidupnya.
- d. Karya-karya lain

Selain karya yang telah disebutkan di atas, Ibnu Khaldun sebenarnya memiliki karya-karya lainnya seperti: *Burdah al-Bushairi*, tentang logika dan aritmatika dan beberapa resume ilmu fiqih. Sementara itu masih ada dua karya Ibnu Khaldun yang yang masih sempat dilestarikan yaitu sebuah ikhtisar yang ditulis Ibnu Khaldun dengan tangannya sendiri ini berjudul *Lubab al-Muhashal fi Ushul ad-Din*. Dan kitab *Syifa al-Sailfi Tahdzib al-Massat yang* ditulis Ibnu Khaldun ketika berada di Fez, adalah karya pertama yang berbicara tentang teologi skolastik dan karya kedua membahas tentang mistisisme konvensional.

3. Sketsa Historis dan Politik pada masa Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun hidup pada abad ke-14 M atau abad ke-8 H. Abad ini merupakan periode terjadinya perubahan historis yang pasif, di bidang perpolitikan ataupun pemikiran bagi orang barat, dimana pada masa ini merupakan lahirnya bibit zaman Renaisans. Periode ini untuk Islam sendiri bisa disebutkan saat terjadinya kemunduran serta disintegrasi. Ibnu Khaldun dibesarkan dalam kondisi seperti ini dan menghabiskan lebih dari dua pertiga umurnya di kawasan Afrika Barat Laut, yang saat itu berdiri beberapa negara seperti Tunisia, Aljazair dan Maroko serta Andalusia yang terletak di ujung selatan Spanyol. Pada masa itu kawasan tersebut menjadi kancah perebutan dan pertarungan kekuatan antara dinasti, serta pemberontakan sehingga kawasan tersebut sering berpindah tangan dari satu dinasti ke dinasti lain. Ibnu Khaldun pun berperan dalam percaturan politik yang sarat dengan perebutan kekuasaan tersebut.⁹

Dalam kancah perpolitikan, Ibnu Khaldun sering kali berpindah jabatan dan bergeser loyalitas dari seorang penguasa ke penguasa lain dari dinasti yang sama. Jabatan pemerintahan pertama yang cukup berarti baginya yaitu menjadi keanggotaan majelis ilmuwan Sultan Abu Inan dari Bani Marin di ibu kota negara itu, yaitu Fez. Kemudian diangkat menjadi sekretaris Sultan dengan tugas mencatat semua Kesenangan keputusan Sultan terhadap semua permohonan rakyat, juga dokumen-ajar kepada para ulama dan sastrawan dari Andalusia dan Tunisia. Beliau sering mendatangi perpustakaan Fez yang dianggap sebagai perpustakaan terbesar dan terlengkap saadokumen lain yang diajukan

⁹ Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran Kehidupan bernegara era modern*. (Jambi: Sultan thaha press), 27.

kepada sultan. Selama berada di Fez, Ibnu Khaldun masih terus belt itu. dalam menuntun ilmu serta terjun ke dunia politik menjadi salah satu ambisinya untuk memegang jabatan penting agar bisa menguasai dan memerintah suatu daerah. Ambisi tersebut bukan tidak ada alasan, namun berharap untuk mengembalikan kejayaan masa lalu seperti pada memerintah masa kakeknya, bahwa ketika masa pemerintahan Bani Hafsi, kakeknya yang pertama di Tunisia dan kakeknya yang kedua memerintah di Bijayah, dimana saat itu sistem perpolitikan masih sangat baik.¹⁰

Sebagaimana para tokoh pemikir Islam lainnya, Ibnu Khaldun juga ikut serta menyaksikan keruntuhan peradaban Islam yang sudah tidak lagi utuh seperti pada masa-masa sebelumnya. Peradaban Islam yang sebelumnya mengalami kejayaan dan perkembangan, namun pada masa Ibnu Khaldun telah berubah menjadi negara-negara kecil yang saling memusuhi. Hal ini terjadi diakibatkan oleh lemahnya konsep pemerintahan, sering terjadinya perlawanan dari rakyat, perang antar etnis, serta kerakusan Negara Eropa dalam menaklukkan wilayah-wilayah Arab Islam. Hal tersebut secara otomatis mempengaruhi pemikiran Ibnu Khaldun dalam menata ilmu perpolitikan.

Setelah berkarir dalam dunia politik dengan berbagai jabatan seperti penulis naskah pidato sultan, duta keliling kerajaan, penasihat, dan sebagai hakim kepala pengadilan di berbagai negara dalam perjalanan yang panjang, akhirnya Ibnu Khaldun memutuskan untuk berhenti mengejar karir politik yang nampaknya tidak pernah memuaskan hati nuraninya dan pada akhirnya meminta maaf kepada raja Talmishan karena tidak mampu melaksanakan perintah yang telah dititipkan kepadanya. Beliau pun meminta izin kepada raja untuk mengasingkan diri di benteng Ibnu Salamah (sebuah wilayah di Privinsi Tojin) agar bisa berkonsentrasi dalam memikirkan realita peradaban Islam dan menulis sebuah karya ilmiah. Melalui pemahaman terhadap sejarah masa lalu, Ibnu Khaldun berusaha mengetahui penyebab permasalahan peradaban Islam yang sedang terjadi pada masanya. Kajian tersebut mencakup semua lini sosial, meliputi segi ekonomi, geografi, agama, intelektual dan politik pada tiap-tiap peradaban manusia tanpa mengabaikan karakteristik peradaban Arab Islam.¹¹

Setelah Ibnu Khaldun memutuskan untuk berhenti dalam menggeluti dunia perpolitikan, maka beliau pergi meninggalkan Tunisia dan berlayar menuju Alexandria, Mesir pada tahun 784 H/1328 M. Disana beliau bercita-cita menduduki suatu jabatan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, apalagi popularitasnya telah tercium sampai ke Kairo-Mesir. Rakyat Mesir telah banyak mengenal tentang dirinya, autobiografinya serta pembahasan-pembahasan sosial dan sejarahnya. Lembaga ilmu pengetahuan, pemikiran dan kesusteraan yang berada di Kairo telah mengenal kitab *Muqaddimah*-nya. Tidak hanya masyarakat umum, raja Mesir saat itu bernama *Al Dzahir Burquq* ternyata beliau juga telah mendengar kemasyuran Ibnu Khaldun tentang kepiawaiannya sebagai fakih mazhab maliki. Sehingga pada tahun 786 H Ibnu Khaldun diangkat oleh raja Mesir sebagai ketua pengadilan kerajaan.¹²

Tidak hanya jabatan itu yang diamanahkan oleh raja Mesir kepada Ibnu Khaldun, juga banyak diamanahi dalam bidang lain, seperti diangkat sebagai dosen fikih maliki pada lembaga Pendidikan Qamiyah di Kairo, lalu diangkat pula menjadi hakim agung mazhab maliki di kerajaan Mesir saat itu. Namun, kendala utama bagi Ibnu Khaldun adalah persaingan antara para pejabat tinggi dan ilmuwan, khususnya para ahli hukum, oleh karena itulah beliau berhasil difitnah melakukan reformasi hukum hingga dipecat dari

¹⁰ Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta: UI-press. 1993), 91-92.

¹¹ Anshori, Subkhan. *Filsafat Islam Antara Ilmu dan Kepentingan*. (Jakarta: Pustaka Azhar. 2014), 182.

¹² Syam, Firdaus. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Bumi Aksara. 200, 72-73.

jabatan tersebut, ternyata kehidupan Ibnu Khaldun di Mesir pun selalu mengalami pasang-surut, sebagaimana beliau pernah dipenjarakan dalam karir politiknya.¹³

Pemikiran Politik Ibnu Khaldun

Melihat dari uraian di atas tentang situasi politik pada masa Ibnu Khaldun, bisa disimpulkan bahwa Ibnu Khaldun hidup pada masa kegelapan Islam. Dimana pada ini lebih dikenal dengan masa pembukuan dan penysarahan terhadap sejarah kehidupan pada masa kenabian dan Khulafaur Rayidun. Namun Ibnu Khaldun mampu menghantarkan jiwanya untuk melahirkan intelektual yang berbeda dengan pemikiran muslim pada saat itu dan pada masa sebelumnya. Ibnu Khaldun menjadikan sejarah sebagai latar belakang keilmuan atau sebagai sumber pijakan semua jawaban persoalan dari sudut pandang latar belakang lahirnya sebuah peristiwa sejarah itu sendiri, konsep ini dikenal dengan *thaba'i al-umran* (dinamika internar sosial masyarakat), berbeda dengan para intelektual lain yang hanya memandang sejarah sebagai sebuah peristiwa lahiriah tidak sampai pada latar belakang peristiwa sejarah. Hal inilah yang membentuk pola pikir intelektual Ibnu Khaldun berbeda dengan yang lain dan diakui keilmuannya dalam semua bidang. Para politikus menganggap Ibnu Khaldun sebagai politikus yang gemilang, begitu juga sosiolog, antropolog, sejarawan dan ekonom.¹⁴

Ibnu Khaldun memandang manusia sebagai makhluk sosial yang tersusun dari dua unsur, pertama unsur tanah dan yang kedua unsur ruh tanah. Secara fisik manusia diciptakan dari tanah atau dari lumpur sebagai simbol kenistaan atau kehinaan. Kehinaan inilah yang sangat kuat dalam pandangan Iblis saat melihat Nabi Adam AS dan tidak mau sujud kepadanya saat Allah memerintahkan kepada Iblis. Tetapi disamping itu, manusia memiliki dimensi lain yang sangat mulia, yaitu dimensi ruh, karena ruh merupakan tiupan tuhan secara langsung, maka manusia juga memiliki dimensi kemuliaan yaitu potensi keberagamaan, oleh karenanya kondisi hina atau mulia seseorang manusi tergantung bagaimana ia mengelola dari dua modal besar ini yang telah ada pada diri manusia secara fitrah.¹⁵

Sebagai makhluk sosial tentunya manusia sangat memerlukan terhadap satu sama lain untuk mewujudkan sebuah tujuan hidup yang sama yaitu untuk mempertahankan hidup terutama persoalan makanan. Sekilah terlihat seharusnya manusia tidak hidup berkelompok-kelompok, mengingat tujuan hidup yang sama yaitu mempertahankan pola keberlangsungan hidup, namun kenapa realita manusia hidup berkelompok, bersuku dan bernegara? Hal ini tidak terlepas dari waktak manusia yang dipengaruhi oleh dua unsur di atas. Unsur penciptaan dari tanah mewarisi sikap manusia seperti watak binatang yang cenderung pada sifat rakus, sombong dan iri dan sifat ini membawa perilaku manusia saling menyerang dan saling memusuhi antara satu dengan yang lainnya. Penyerayan dan permusuhan inilah yang kemunian menyebabkan manusia hidup berkelompok untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Tidak sampai disitu, saat satu kelompok sudah kuat, ia memiliki kecenderungan yang sama seperti saat sendiri, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya juga saling menyerang dan bermusuhan yang pada akhirnya melahirkan kelompok besar akibat dari penggabungan kelompok yang kalah dan perilaku ini terus terjadi sampai saat ini sehingga lahirlah istilah negara adidaya dan adikuasa.

Menurut Ibnu Khaldun pengelompokan manusia ini terjadi akibat dalam diri manusia memiliki sifat *ta'asub* atau fanatisme yaitu perasaan bahwa dirinya bahagian dari satu kelompok yang tidak terpisahkan dari kelompok yang menjadi afiliasinya. Fanatisme ini muncul dengan beberapa faktor, ada yang disebabkan oleh tali keturunan atau hubungan

¹³ Sjadzali, Munawir. *Islam*, 97.

¹⁴ Mansur, *Model Kekuasaan Ibnu Khaldun*, UNISA, Vol. XXX, no 66, 2007, 378.

¹⁵ Mansur, *Model.....* 379.

darah, ada juga dipengaruhi oleh persahabatan atau pertemanan. Akibat dari dua faktor ini berubahlah cara pandang manusia dari awalnya mengedepan kepentingan individu menjadi kepentingan suku atau kelompok. Demi kepentingan dan eksistensi suku atau kelompok, manusia rela melakukan apa saja. Kesadaran atau fanatisme yang kuat terhadap kesukuan atau kelompok membuat manusia buta terhadap nilai baik atau tidak baik, dhalim atau tidak.

Menurut Ibnu Khaldun, dalam mempertahankan eksistensi suku atau kelompok harus ada otoritas. Otoritas ini diperlukan untuk meredakan konflik yang terjadi dalam internal suku atau untuk mengendalikan suku dari serangan luar. Dalam konsep pemikiran Ibnu Khaldun, yang dimaksud dengan otoritas disini tergantung konteks. Dalam konteks suku Badui, otoritas yang dimaksud adalah karismatik dan kekuatan, seseorang akan dijadikan otoritas saat ia memiliki karisma yang tinggi dan kekuatan yang kuat. Perlu digaris bawahi bahwa setiap kelompok dan suku memiliki makna otoritas yang berbeda-beda. Dari prinsip fanatisme melahirkan otoritas dan terakhir lahirlah konsep negara yang paling populer dalam pemikiran Ibnu Khaldun yang dikenal dengan istilah '*ashabiyah*'.

1. Peran Politis '*Ashabiyah* (Solidaritas Kelompok)

Secara etimologis '*ashabiyah* berasal dari kata '*ashaba* yang berarti mengikat. Secara fungsional '*ashabiyah* menunjuk pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Selain itu, '*ashabiyah* juga dapat dipahami sebagai solidaritas sosial, dengan menekankan pada kesadaran, kepaduan dan persatuan kelompok.

Menurut Muhammad Mahmud Rabie' yang dikutip oleh Muhammad Ilham¹⁶ '*ashabiyah* merupakan suatu jalinan sosial yang dapat membangun kesatuan suatu bangsa, terlepas apakah itu dipengaruhi oleh ikatan kekeluargaan maupun persekutuan. Dalam peran sosial, '*ashabiyah* dapat melahirkan persatuan yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok. *Pertama*, menumbuhkan solidaritas kekuatan dalam setiap jiwa kelompok. *Kedua*, keberadaan '*ashabiyah* dapat mempersatukan berbagai '*ashabiyah* yang bertentangan, sehingga menjadi suatu kelompok yang lebih besar dan utuh.

Setiap komunitas atau pemukiman dari suatu suku memiliki satu solidaritas kelompok karena memiliki garis keturunan yang sama secara umum, namun di antara mereka juga memiliki solidaritas lain berdasarkan garis keturunan secara khusus, yang membuat mereka lebih dekat dengan garis keturunan ini dibandingkan dengan garis keturunan mereka secara umum. Misalnya: Solidaritas satu klan, satu anggota keluarga, atau satu saudara seapak yang tentunya berbeda dengan solidaritas dengan satu saudara sepupu, baik yang terdekat maupun terjauh. Masing-masing dari mereka memiliki solidaritas kelompok yang lebih dekat dengan garis keturunan mereka yang terdekat dan memiliki solidaritas kelompok yang sama dengan yang lain dalam garis keturunan mereka secara umum.

Kebanggaan bisa saja terdapat dalam garis keturunan mereka yang lebih dekat dan bisa juga terdapat dalam garis keturunan mereka secara umum. Namun biasanya mereka lebih bangga dengan garis keturunan terdekat mereka karena memiliki persaudaraan sedarah yang lebih kental. Kepemimpinan di antara mereka hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki garis keturunan terdekat dan bukan secara keseluruhan.¹⁷ Ketika kepemimpinan itu hanya dapat diraih dengan kekuasaan, maka solidaritas kelompok mereka yang memiliki bagian dari kepemimpinan tersebut haruslah lebih kuat dibandingkan solidaritas-solidaritas kelompok lain yang ada di antara mereka, sehingga

¹⁶ M. Ilham, *Konsep Ashabiyah dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jurnal Politik Profetik Volume 04, No. 1 Tahun 2016, 4

¹⁷ Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah*, ter. Masturi Irham dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 199.

memungkinkannya dapat menguasai dan meraih puncak kepemimpinan dengan baik. Jika poin-poin penting ini telah mereka penuhi, maka dapat dipastikan bahwa kepemimpinan atas mereka itu masih dipegang oleh mereka yang memiliki bagian khusus yang dapat menguasai mereka, sebab jika kekuasaan tersebut keluar dari kalangan mereka dan berpindah ke solidaritas kelompok yang lain diluar solidaritas mereka dalam kekuasaan tersebut, maka mereka tidak akan dapat memimpin dengan baik. Dengan demikian, bagian kepemimpinan tersebut tentulah akan terus bergulir dari garis keturunan yang satu ke garis keturunan yang lain.

Kepemimpinan tersebut tidak akan berpindah kecuali kepada garis keturunan yang memiliki solidaritas kelompok lebih kuat, sebab kesatuan sosial dan fanatisme dalam masyarakat merupakan karakter alami yang membentuk kepemimpinan tersebut. Temperamen yang membentuk kepemimpinan ini tidak akan berfungsi dengan baik jika unsur-unsur dalam masyarakat memiliki kekuatan yang sama, sehingga salah satu dari unsur-unsur tersebut harus dapat menguasai yang lain.

Menurut Khaldun, suatu suku mungkin dapat membentuk dan memelihara suatu negara apabila suku itu memiliki sejumlah karakteristik sosial-politik tertentu, yang oleh Ibnu Khaldun disebut dengan *Ashabah*. Karakteristik ini justru berada hanya dalam kerangka kebudayaan desa. Oleh karena itu penguasaan atas kekuasaan dan pendirian Negara, sehingga munculnya kebudayaan kota akan membuat sirnanya '*ashabiyah* yang mengakibatkan melemahnya Negara.¹⁸

'*Ashabiyah* adalah kekuatan penggerak Negara dan merupakan landasan tegaknya suatu Negara atau dinasti. Bilamana Negara atau dinasti tersebut telah mapan, ia akan berupaya menghancurkan '*ashabiyah*. '*Ashabiyah* mempunyai peran besar dalam perluasan Negara setelah sebelumnya merupakan landasan tegaknya Negara tersebut. Bila '*ashabiyah* itu kuat, maka Negara yang muncul relative terbatas.¹⁹

Menurut Ibnu Khaldun, '*ashabiyah* ini timbul karena faktor-faktor pertalian darah atau pertalian kaum dan rasa cinta seseorang terhadap nasab dan golongannya. Hal ini akan menimbulkan perasaan senasib dan sepenanggungan serta melahirkan kerja sama dalam berbagai bidang. '*Ashabiyah* juga melahirkan persatuan dan pergaulan di antara mereka. Dengan '*ashabiyah* ini penguasa akan memilih orang-orang yang memiliki hubungan dengan penguasa ke dalam jajaran pemerintahannya.²⁰

'*Ashabiyah* bisa merupakan alat perjuangan, alat penyerang dan bertahan. Dapat pula sebagai alat penyelesaian konflik antar golongan, yakni bila konflik ini harus diselesaikan secara kekerasan. Dalam masyarakat menetapkan tujuan terakhir *ashabiyah* adalah Mulk, kekuasaan-wibawa yang pada akhirnya melemahkan kemauan agar dituruti, kalau perlu dengan kekerasan. Pada tahap selanjutnya, alat-alat kekuasaan termasuk *ashabiyah* kurang memegang peranan sebagaimana ia diperlukan untuk menegakkan kekuasaan itu di awal mula. Penguasa dan orang-orang yang telah membantunya menegakkan kekuasaan itu mulai melihat kepada hal-hal lain yang dirasakan lebih menarik, terutama kemewahan yang datang tanpa dicari. Karena pada dasarnya tabiat kekuasaan itu diiringi dengan kemewahan. Tetapi kemewahan ini hanya pada permulaan saja akan menambah si penguasa. Akhirnya ia akan melemahkan kekuatan ini, sebab ia mengandung sifat yang merusak akhlak manusia. Kemewahan akan melupakan seseorang tentang kewajiban-kewajibannya yang sesuai yang harus dipenuhi sebagai seorang penguasa. Kemudian melemahkan *ashabiyah*. Dengan

¹⁸ Zainab Al-Khudhairi, *Filsafat*..... 141

¹⁹ Zainab Al-Khudhairi, *Filsafat*..... 159

²⁰ Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 49-50.

demikian, seorang penguasa mendasarkan kekuasaannya pada serdadu upahan, yang merupakan pejabat-pejabat yang tidak mengenal *'ashabiyah*. Bila ini terjadi, sekurang-kurangnya buat sementara, kekuasaan akan menuju pada pemusatan kekuasaan. Kemudian kekerasan untuk memaksakan kehendak.

Di masa awal terbentuknya sebuah negara, bagaimanapun *'ashabiyah* tetap dianggap sebagai faktor esensial bagi kelanjutan negara. Pada masa ini, masyarakat harus membangun lembaga-lembaga yang perlu bagi budaya peradaban, termasuk kelembagaan kelas penguasa baru. Hasilnya, kata Khaldun, adalah kemunculan hubungan-hubungan politik baru, selain berbagai aktivitas politik yang baru. Semua ini tak akan tercapai dengan baik, kecuali dengan *ashabiyah*, yang akan semakin kuat dengan bantuan sentimen agama.

Karena itu, ia memandang pentingnya *ashabiyah* dalam suatu masyarakat dan negara. Bila *'ashabiyah* dibina dan dikelola dengan baik, ia akan menjaga dan terus menumbuhkan stabilitas politik dan keamanan. Teori yang dikemukakan Khaldun itu kemudian dikenal orang sebagai "Teori Disintegrasi" (ancaman perpecahan suatu masyarakat/bangsa).

2. Kekuasaan

Kekuasaan merupakan sesuatu yang natural bagi manusia, yang secara naluri itu cenderung hidup bermasyarakat. Naluri manusia pada dasarnya cenderung pada kebaikan daripada kejahatan dalam kedudukannya sebagai makhluk yang berakal, sebab sifat jahat manusia berasal dari unsur hewannya. Adapun kedudukannya sebagai manusia itu cenderung lebih dekat pada kebaikan. Kekuasaan merupakan bagian dari diri manusia dalam kedudukannya sebagai manusia, sebab keduanya hanya terdapat dalam dunia manusia dan tidak pada binatang. Dengan demikian, kebaikan merupakan karakter yang sesuai dengan kekuasaan.

Jika kekuasaan merupakan tujuan utama *'ashabiyah*, maka kekuasaan ini juga menjadi tujuan utama bagi cabang-cabang dan pelengkapannya, yaitu: karakter yang baik, sebab eksistensi kebesaran tanpa aksesoris pelengkapannya bagaikan eksistensi seseorang tanpa anggota tubuh atau tampil tanpa busana di hadapan masyarakat. Jika hanya memiliki *'ashabiyah* saja tanpa dihiasi dengan karakter-karakter yang baik, maka hal ini merupakan aib bagi anggota keturunan dan kedudukan. Di samping itu, kekuasaan merupakan jaminan bagi makhluk dan pelimpahan kekuasaan Allah kepada hamba-hamba-Nya agar dapat menerapkan hukum-hukum-Nya di antara mereka. Hukum-hukum Allah pada makhluk dan hamba-hamba-Nya hanya dapat direalisasikan dengan kebaikan dan menjaga berbagai kepentingan. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam syariat-syariat-Nya, sedangkan hukum-hukum manusia terlahir dari kebodohan manusia dan tipu daya setan. Berbeda dengan kehendak Allah dan kekuasaannya, yang mencakup kebaikan dan keburukan sekaligus. Dialah Allah yang menentukan semua itu (baik dan buruk), sebab tidak ada yang mampu melakukannya selain-Nya.

Dengan kenyataan ini, maka orang yang memiliki *'ashabiyah* yang dibarengi dengan kekuasaan Allah dan dihiasi dengan karakter yang terpuji dan sesuai untuk melaksanakan hukum-hukum Allah pada hamba-hamba-Nya, maka dia telah siap untuk memegang tanggung jawab sebagai khalifah Allah pada hamba-hamba-Nya dan menjamin ciptaan-Nya, serta memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas mulia tersebut.²¹ Dari keterangan ini, jelaslah bahwa karakter yang baik merupakan salah satu faktor pendorong tercapainya puncak kekuasaan bagi orang yang memiliki *'ashabiyah* yang memadai.

²¹ Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah*..... 227-228

Jika kita melihat orang-orang yang memiliki ‘*ashabiyah* dan telah menguasai berbagai wilayah dan bangsa, maka kita melihat mereka berkompetisi dalam kebaikan dan menampilkan karakter-karakter yang terpuji seperti: kedermawanan, mudah memaafkan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, mau menerima dan berinteraksi dengan orang-orang yang tidak mampu menghormati dan memuliakan tamu-tamu yang datang, membantu semua orang, memberikan mata pencaharian kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan, bersabar atas berbagai cobaan yang telah menimpa, menepati janji, mendermakan sebagian harta benda untuk menjaga harga diri dan kehormatan, mengagungkan hukum agama dengan menjalankan dan menegakkannya, memuliakan dan menaruh hormat kepada para ulama yang wara dengan keilmuannya, mengikuti petunjuk dan nasihat mereka untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya dan berbaik sangka terhadap mereka, mempercayai orang-orang yang ahli dalam agama, bertabarruk dan mengharapkan do’a mereka, tunduk pada kebenaran dan menyerukannya kepada orang lain, berempati kepada orang-orang cacat dan berupaya meringankan kondisi mereka dan mengikuti kebenaran yang dinasihatkannya, bersikap rendah hati kepada orang-orang miskin, mendengar keluhan orang-orang yang meminta bantuan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan perintah agama dan aturan-aturan syariat, bersungguh-sungguh dalam beribadah dan berupaya meningkatkannya, menjauhkan diri dari pengkhianatan, penipuan, monopoli, melanggar perjanjian, dan berbagai karakter terpuji lainnya.²²

Kekuasaan merupakan pangkat yang paling sesuai dan terbaik bagi ‘*ashabiyah* mereka. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa Allah meridhai kekuasaan mereka dan menyerahkannya kepada mereka. Sebaliknya, jika Allah menghendaki kehancuran kekuasaan dari suatu bangsa, maka Allah menuntun mereka melakukan berbagai kejahatan, menghiasi diri mereka dengan perbuatan tercela dan membuka jalan-jalan untuk mencapainya. Dengan sikap dan perilaku semacam ini, maka keutamaan-keutamaan terpuji dalam berpolitik hilang dari mereka. Kondisi semacam ini akan terus berlanjut hingga kekuasaan tercabut dari diri mereka dan menggantikannya dengan bangsa lain, sebagai peringatan kepada mereka atas terampasnya semua anugrah dan berbagai kenikmatan yang dilimpahkan Allah kepada mereka.

Sedangkan diantara karakter-karakter keagungan dan kesempurnaan yang diperebutkan berbagai kabilah yang memiliki ‘*ashabiyah* dan menjadi faktor pendorong mereka untuk mencapai kekuasaan adalah menghormati dan memuliakan para ulama, orang-orang saleh, orang-orang terhormat yang memiliki pangkat dan kedudukan, para saudagar, orang-orang asing, dan menempatkan setiap orang sesuai tempat dan kedudukannya.²³ Hal ini karena penghormatan berbagai kabilah, kelompok-kelompok ‘*ashabiyah* dan kesukuan kepada semua orang yang mendukung mereka dan menyambung tali kekeluargaan dan ‘*ashabiyah*, serta berperan serta membantu memperluas kebesaran dan kekuasaan mereka itu merupakan sesuatu yang natural dan dilandasi oleh keinginan untuk mendapatkan pangkat, sebab perasaan takut dengan kaum yang dihormati, ataupun harapan mendapatkan perlakuan serupa darinya.

Adapun orang-orang yang tidak memiliki ‘*ashabiyah* yang ditakuti dan kedudukan yang dapat diharapkan, maka kemuliaan mereka akan diragukan. Tampak tujuan mereka dalam menggapai kekuasaan tersebut hanya untuk kebesaran atau kesombongan dan menghiasi diri dengan karakter-karakter kesempurnaan, dan siap

²² Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah*,..... 228-229

²³ Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah*,..... 229-230

memasuki politik praktis tanpa memperdulikan kebenaran, sebab menghormati teman koalisi dan rival politik merupakan sikap yang penting dilakukan terutama dalam politik yang sifatnya khusus: antara kabilahnya dan kompetitornya, memuliakan tamu-tamu agung dan bermalam di kediamannya.

Karakter-karakter khusus ini merupakan kesempurnaan dalam kehidupan berpolitik secara umum. Orang-orang saleh dan ahli agama dibutuhkan untuk mendirikan atau menegakkan simbol-simbol keagamaan dan syariat. Para saudagar dibutuhkan untuk mendorong terjadinya regulasi komoditi perniagaan yang mereka bawa sehingga memberikan manfaat dalam masyarakat. Orang-orang asing dengan kemuliaan etika dan menghormati mereka sesuai tempat dan kedudukannya merupakan sikap toleran. Sifat-sifat semacam ini merupakan sikap yang toleran dan berkeadilan.

Apabila seseorang dalam suatu *'ashabiyah* menghiasi diri dengan karakter-karakter terpuji semacam ini, dapat diketahui bahwa mereka sedang berupaya mencapai puncak politik secara umum, yaitu kekuasaan. Allah meridhai keberadaan karakter-karakter tersebut pada diri mereka lewat tanda-tanda yang dapat kita lihat, oleh karena itu, apabila Allah menghendaki tercabutnya kekuasaan dan pemerintahan dari suatu kaum yang berkuasa, maka yang dapat kita lihat dan akan hilang pertama kali adalah sejauh mana mereka memuliakan orang-orang tersebut (para ulama dan lain-lainnya). Apabila penghormatan tersebut telah hilang dari suatu bangsa, maka ketahuilah, nilai-nilai keutamaan dan kearifan telah mulai menghilang dari mereka, yang lalu diikuti dengan hilangnya kekuasaan dari mereka.²⁴

3. Khalifah (Penguasa)

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa adanya khalifah itu adalah ciri yang membedakan manusia dari makhluk lain di alam semesta ini. Setiap manusia sudah pasti memerlukan khalifah, karena dalam diri manusia itu masih tersisa sifat-sifat kebinatangan dan kecenderungan untuk menganiaya orang lain. Seandainya khalifah itu tidak ada, kehidupan manusia akan berada dalam keadaan kacau-balau dan penuh dengan situasi anarki yang pada akhirnya akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Jadi bagi Ibnu Khaldun, khalifah bukan orang yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain, akan tetapi seseorang yang melakukan suatu tugas sosial yang penting, yang tujuannya itu berkaitan erat dengan kelanjutan eksistensi manusia itu sendiri.

Kepentingan rakyat pada khalifah itu bukan pada diri dan tubuhnya, seperti: keelokan bentuk badannya, kecantikan wajahnya, kebesaran tubuhnya, luas ilmu pengetahuannya, indah tulisannya, atau kecerdasan otaknya. Kepentingan mereka itu terletak dalam hubungan dia dan mereka. Oleh karena itu kekuasaan dan khalifah itu termasuk hal yang bersifat relasional. Jadi terdapat keseimbangan antara kedua belah pihak. Dia dinamakan khalifah karena ia mengurus persoalan rakyat. Khalifah adalah seseorang yang mempunyai rakyat, sedangkan rakyat adalah mereka yang memiliki khalifah.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa bagi Ibnu Khaldun sebenarnya tidak ada suatu hal yang khusus, yang terdapat pada diri khalifah, selain bahwa ia dipercayai rakyat untuk mengurus mereka. Kepentingan yang dimilikinya bukan karena sesuatu hal luar biasa yang terdapat dalam dirinya, akan tetapi karena rakyat mempercayakan kepadanya untuk mengurus urusan mereka. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa baik-buruknya seorang khalifah itu sangat tergantung pada bagaimana cara ia

²⁴ Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah*,..... 230-231

²⁵ Abdul Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), 190-191.

mengurus kepentingan rakyat tersebut. Apabila kekuasaannya itu dilaksanakan dengan lemah lembut, semua pihak, termasuk khalifah dan rakyat, akan berada dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sedangkan apabila kekuasaan itu dilaksanakan dengan kekerasan, penindasan, serta selalu mencari kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan rakyat, maka rakyat akan diselimuti oleh rasa ketakutan dan merasa tertindas.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kekerasan dalam melaksanakan kekuasaan itu biasanya bersumber pada kecerdasan otak khalifah itu. Otaknya yang terlalu cerdas itu membuat pandangannya terlalu jauh ke depan. Khalifah seperti itu menghendaki rakyat melaksanakan rencana-rencananya yang berjangka panjang, sehingga sangat memberatkan rakyat. Berdasarkan kenyataan itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa seorang khalifah itu jangan terlalu pintar.

Selain itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa khalifah itu adalah seorang manusia biasa yang lemah, sama keadaannya dengan orang-orang lain. Perbedaannya adalah karena dia memikul beban yang lebih berat. Oleh karena itu, ia memerlukan bantuan dari orang lain. Ia membutuhkan tentara yang akan melindunginya dari musuh-musuhnya juga membutuhkan orang-orang yang akan menjalankan roda pemerintahan, oleh karena itu ia membutuhkan kementerian, pengawal, bagian administrasi dan perpajakan, bagian surat-menyurat, kepolisian, angkatan laut dan lain sebagainya. Semuanya ini dimaksudkan untuk membantunya dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah tersebut.

Khalifah harus memiliki beberapa perangkat fasilitas dan hak yang dapat membantunya dalam melaksanakan tugasnya dengan baik di tengah masyarakat. Di antaranya adalah dominasi, pemerintahan dan kekuasaan untuk melakukan kekerasan. Semuanya ini dipergunakan untuk mencegah agar sampai terjadi perselisihan dan kesewenang-wenangan dalam masyarakat, sebagai akibat dari sisa-sisa kebinatangan dan kecenderungan untuk berbuat aniaya di antara sesama manusia, kalau sampai terjadi hal itu, maka tugasnya adalah untuk menyelesaikannya.²⁶

4. Negara

Kondisi ideal sebuah negara akan muncul, manakala terciptanya suatu tatanan interaksi sosial antara warga negara yang memiliki kesatuan visi dalam memandang komunitasnya sebagai sub sistem dari sistem kenegaraan. Sikap yang demikian diistilahkan Khaldun dengan sikap '*ashabiyah* (solidaritas golongan). Dalam tataran ini, konsep '*ashabiyah* yang dikembangkannya, pada proses awal dimaknai sebagai perasaan *nasab*, baik karena pertalian darah atau pertalian kesukuan. Perasaan yang demikian akan mengikat mereka dalam sebuah solidaritas kolektif. Menurutnya, proses ini muncul secara alamiah. Dengan adanya '*ashabiyah* dalam komunitas manusia, maka akan timbul rasa cinta (*nur'at*) dan kepedulian yang tinggi terhadap komunitasnya, bahkan berupaya untuk senantiasa mempertahankannya. Melalui perasaan cinta dalam komunitasnya tersebut, maka akan tumbuh perasaan senasib sepenanggungan, harga diri, kesetiaan, dan saling membantu antara satu dengan yang lain. Pertalian ini akan menimbulkan persatuan dan pergaulan yang harmonis antar komunitas yang ada. Pertalian '*ashabiyah* yang demikian pada tahap selanjutnya membentuk *nasab* umum; perasaan yang mengikat berbagai *nasab* dalam sebuah persaudaraan atau solidaritas kolektif. Perasaan ini diikat oleh kesatuan visi, misi, sejarah, tanah air, dan bahasa.²⁷

Hubungan harmonis antara kedua macam *nasab* di atas akan menimbulkan kesatuan cita-cita dan tujuan. Sikap ini pada gilirannya akan melahirkan suatu sikap positif terhadap

²⁶ Abdul Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara*....., 192-193

²⁷ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Terj. Ahmadi Thaha. Jakarta, Pustaka Firdaus, 1986, 128

eksistensi sebuah negara. Dalam hal ini, Ibn Khaldun lebih mengelaborasi pengertian ‘*ashabiyah*’ dalam bentuk makna kedua, yaitu ‘*ashabiyah*’ yang tidak lagi sebatas hubungan *nasab*, akan tetapi hubungan antar kelompok manusia yang memiliki kesatuan tujuan bernegara. Interaksi antar *nasab* ini secara luas terjadi melalui berbagai bentuk, melalui perjanjian atau kesepakatan, proses penaklukan, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, terlihat bahwa konsep ‘*ashabiyah*’ yang dibangun Khaldun telah melampaui batas terminologis ‘*ashabiyah*’ yang difahami masyarakat sebelumnya, bahkan waktu itu.²⁸

Tatkala sikap ini terbentuk secara harmonis, maka pada waktu bersamaan eksistensi *al-mulk* (kepala negara) diperlukan. Hal ini diwujudkan sebagai konsekuensi terhadap tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya perlindungan, keamanan, dan terpeliharanya berbagai kepentingan masyarakat lainnya. Untuk mewujudkan tuntutan kolektivitas tersebut, seorang kepala negara dituntut untuk memiliki superioritas intelektual dan kepribadian (*al-taghalluf*) yang lebih dari rakyatnya. Dengan sikap ini, seorang kepala negara akan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, objektif, adil (dengan melaksanakan supremasi hukum), dan amanah. Jika sikap ini justeru terabaikan pada seorang pemimpin, maka eksistensinya akan menjadi bumerang bagi terlaksananya roda pemerintahan yang seyogyanya mengayomi masyarakat luas.²⁹

Menurut Khaldun, hanya negara yang memiliki ‘*ashabiyah*’ yang kuat akan mampu menciptakan sebuah peradaban umat manusia yang tinggi. Akan tetapi, jika rasa ‘*ashabiyah*’ pudar dan hanya dipahami secara sempit, maka yang ada hanyalah nepotisme-absolut yang membuat hancurnya sebuah negara.³⁰ Konsep ‘*ashabiyah*’ yang dimaksud Ibn Khaldun dalam makna luas, bila ditarik pada dataran kehidupan berbangsa-bernegara disebut dengan solidaritas dan dukungan rakyat terhadap pemerintahan. Semakin besar dukungan rakyat, maka akan semakin kuat suatu negara. Akan tetapi, bila dukungan rakyat semakin kecil, maka semakin lemah bahkan terpecahlah suatu negara.

Menyadari bahwa eksistensi negara merupakan sebuah institusi yang memiliki tanggungjawab yang cukup besar dalam mengayomi seluruh kepentingan rakyatnya, maka Khaldun mencoba mengetengahkan konsep negara dalam pemikiran politiknya secara universal dan fleksibel. Khaldun tidak menyebutkan bentuk negara secara riil dan transparan. Dalam konteks ini, Khaldun memberikan kebebasan kepada setiap komunitas untuk menentukan bentuk negaranya, sesuai dengan cita-cita suatu bangsa yang bersangkutan. Melihat pemikirannya di atas, terkesan bahwa Khaldun sepertinya terwarnai oleh pandangan Ibn Taimiyah yang menyatakan bahwa negara merupakan sesuatu yang diperlukan bagi menegakkan perintah agama. Eksistensi merupakan alat belaka, bukan lembaga yang masuk pada institusi ajaran keagamaan secara intrinsik. Oleh karena itu, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan konsep dan bentuk yang ingin digunakan, sesuai dengan situasi, kondisi, dan kesepakatan komunitas manusia pada suatu negara. Dalam konteks ini, yang diperlukan adalah bagaimana konsep atau bentuk tersebut mampu mewujudkan cita-cita dan menjamin terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Dalam memaparkan konsep negara, Khaldun hanya memberikan rambu-rambu universal bentuk negara ideal, yaitu bentuk *Khalifah* dan *Imamah*. Namun demikian, batasan ini tidaklah perlu dipahami secara etimologis, sebagaimana konsep negara *Khilafah* secara tekstual, di mana sosok kepala negara berfungsi ganda; kepala Negara dan keagamaan, atau konsep *Imamah* yang dipahami kelompok Syi‘ah. Konsep yang ditawarkan Khaldun perlu dipahami dalam batasan filosofis. Batasan ini memberikan makna, bahwa kepala negara di samping sebagai pemimpin yang berfungsi memelihara kesejahteraan

²⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta, LsiK. 1997, 277

²⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah;.....*, 278

³⁰ A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana. 1992, 196

kehidupan duniawi seluruh rakyat, eksistensinya juga merupakan pemimpin (imam) yang seluruh tindakannya (moralitas) merupakan pedoman dan contoh tauladan yang senantiasa menjadi acuan bagi seluruh rakyatnya. Bila pemimpin justeru menampakkan tindakan yang anarkhis, maka akan mengakibatkan rakyat akan ikut melakukan tindakan anarkhis.

Mencermati prototipe pemimpin ideal dalam pemikiran Ibnu Khaldun di atas, sepertinya akan terwakili bila pemimpin memiliki kepribadian filosof yang memiliki sisi kebijaksanaan yang maksimal. Pendekatan idealistik yang dilakukan Khaldun merupakan sebuah kewajaran. Pemikirannya tentang konsep negara banyak dipengaruhi oleh ajaran Plato, terutama tentang konsep raja filosof (pemimpin filosof). Negara ideal adalah negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang berkepribadian filosof. Dengan kepribadian tersebut, maka seorang pemimpin akan mampu memenuhi kriteria pemimpin ideal, yaitu pemimpin yang mampu menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia sebagai manifestasi *khalifah fi al-ardh* yang membawa payung *rahmatan lil 'alamin*. Untuk itu menurut Khaldun, agar penguasa muslim mampu menjadi seorang politikus dan kepala negara yang baik, maka ia harus berusaha terlebih dahulu menjadi manusia yang arif, bijaksana, serta tidak tenggelam dalam kemewahan dan keserakahan duniawiyah.³¹

Agar pemilihan kepala negara benar-benar mampu mengayomi fungsi ideal di atas secara serasi dan seimbang, maka proses pemilihan harus proporsional. Proses tersebut dilakukan melalui *ahl al-hal wa al-'aqd* (semacam DPR-MPR) yang independen, objektif dan adil, tanpa bias subjektivitas kelompok (partai) manapun. Dewan ini merupakan sekumpulan ahli yang menonjol dalam berbagai kapasitasnya, baik keluasan ilmu, kehartawanan, kedudukan di tengah-tengah masyarakat, *muruhah*, berakhlaq al-karimah, dan lain sebagainya. Mereka pada umumnya merupakan kelompok yang memiliki kelebihan dan dipandang cakap untuk melakukan proses musyawarah dalam rangka mengangkat kepala negara. Komunitas mereka bukan merupakan wakil dari masing-masing kelompok (partai) atau daerah. Eksistensinya merupakan perwujudan dari miniatur seluruh rakyat.

Kedudukan *ahl al-hal wa al-'aqd*, secara horizontal merupakan pengembalian amanah masyarakat luas (rakyat). Dewan ini kemudian melimpahkan amanah operasional kenegaraan kepada kepala negara untuk menerapkan semua kebijaksanaan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa-bernegara. Sedangkan secara vertikal, lembaga ini merupakan pemegang amanah Allah untuk mampu memilih pemimpin yang terbaik bagi umat. Di bahu mereka warna dan bentuk negara ditentukan. Adapun kriteria kepala negara yang ideal, di antaranya adalah memiliki pengetahuan yang luas, adil dan objektif, memiliki kemampuan manajemen pemerintahan, berbadan sehat, berakhlaq al-karimah, taat dalam beragama, dan berasal dari suku Quraisy.³²

Dalam memaknai syarat terakhir yang dikemukakannya, bahwa pemimpin ideal berasal dari suku Quraisy, nampaknya perlu dianalisis lebih mendalam. Khaldun sesungguhnya tidak memaknai syarat tersebut secara etimologis-dogmatis. Ia memaknai syarat tersebut secara majazi-historis; bahwa di era awal pemerintahan Islam, sosok pemimpin ideal yang memiliki kesanggupan sebagai pemimpin yang adil, amanah, jujur, intelek, dan bertanggungjawab merupakan prototipe yang hanya dimiliki suku Quraisy.³³ Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila di era ini prototipe suku Quraisy merupakan sosok ideal seorang pemimpin umat.

Namun dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, persyaratan tersebut tidak bisa dipertahankan. Hanya saja, nilai esensinya tetap sama dan masih bisa

³¹ Muhsin Mahdi. *Ibn Khaldun Philosophy of History*, Chicago, The University of Chicago Press. 1971, 286

³² Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*....., 238

³³ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*....., 242

dipergunakan sebagai indikator dalam memilih sosok pemimpin ideal. Dalam hal ini, apabila persyaratan kepribadian tersebut telah dimiliki seseorang di luar suku Quraisy, maka ia berhak untuk memperoleh kepercayaan sebagai pemimpin umat. Bahkan lebih ekstrim, bagi Khaldun kepala negara tidak mesti seorang muslim. Andaikata ia mampu memenuhi kriteria ideal sebagai seorang pemimpin dan selama ia mampu menciptakan kebijaksanaan bagi kemashlahatan umat manusia, maka ia bisa diangkat menjadi kepala negara. Namun demikian, dalam rangka menciptakan masyarakat madani, maka secara ideal kepala negara hendaknya adalah seorang muslim. Hal ini disebabkan, secara normatif, Islam memiliki konsep ideal tersebut.³⁴

Bagi Khaldun kepala negara bukan seorang diktator yang dengan kekuasaannya berusaha untuk memperkaya diri dan memaksakan kehendaknya atas orang lain. Kepala negara merupakan pemimpin umat yang bertugas melaksanakan tanggungjawab sosial dan agama agar manusia bisa hidup tenteram dan harmonis. Kepala negara yang baik adalah kepala negara yang menyadari hakikat eksistensinya sebagai pemegang amanah rakyat dan Allah. Untuk itu, seorang pemimpin akan senantiasa bersikap adil, lemah lembut, bijaksana, jujur, dan memberlakukan hukum sebagaimana mestinya. Bila pemimpin memiliki sikap yang demikian, maka mereka akan bisa hidup bersama rakyat secara harmonis dan bersma-sama membangun negara dan peradabannya.³⁵

Menurut al-Maududi, munculnya pandangan Khaldun di atas merupakan sintesa Islam terhadap bentuk dan sistem pemerintahan monarkhi-absolut atau kepausan (Nasrani) yang menempatkan kepala negara pada posisi yang tinggi dengan kedaulatan mutlak. Akibatnya, kebijaksanaan kepala negara tidak bisa disentuh oleh hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Khaldun menawarkan bentuk demokrasi *khilafah* yang memiliki perwujudan tugas kekhalifahan manusia di muka bumi yang terbatas oleh hukum Ilahiah dan sosial kemasyarakatan.³⁶ Menurut Khaldun, membentuk negara dan pengangkatan kepala negara merupakan suatu kewajiban. Wacana ini didasarkan pada dua alasan, yaitu *Pertama*, alasan syar'ī yang berdasarkan kitab suci dan ijma' sahabat. *Kedua*, alasan kemanusiaan; yaitu manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki diferensiasi individual dan memerlukan sosok pemimpin yang adil.³⁷

Tujuan praktis yang dikembangkan Khaldun melalui pemikiran politiknya tentang negara, sesungguhnya merupakan pantulan konsep moral sebagaimana yang diperlihatkan dalam sejarah sosial Islam, terutama pada masa kepemimpinan Rasulullah. Acuan moral ini merupakan pedoman bagi pemimpin muslim dalam melaksanakan kebijakan politik kenegaraan. Dengan pijakan tersebut, negara akan mampu berfungsi secara ideal, yaitu mengaktualisasikan eksistensinya sebagai wadah keadilan bagi terciptanya kebahagiaan dan nilai kerahmatan bagi seluruh masyarakat.³⁸

Menurut Montgomery Watt, pandangan Khaldun di atas merupakan pandangan yang sangat brilian dari seorang pemikir dunia, bukan saja untuk masa itu, akan tetapi bahkan untuk masa modern. Pemikirannya muncul dari sebuah eksperimen langsung yang demikian panjang dan telah diuji secara alamiah.³⁹ Dengan kemampuan jelajah rasionalnya yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan praktis,

³⁴ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*....., 65. Dan lihat juga Osman Raliby. *Ibn Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*, Jakarta, Bulan Bintang. 1965, 171

³⁵ A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan*....., 94

³⁶ Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995, 243

³⁷ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*....., 235

³⁸ Muhsin Mahdi. *Ibn Khaldun*....., 270

³⁹ W. Montgomery Watt, *Islamic Philosophy and Theology*, Edinburg: Edinburg University Press, 1972, 143

mengantarkan Khaldun sebagai pemikir keagamaan dan politik ulung yang dimiliki Islam dan dunia pada abad pertengahan. Bahkan kepiawaiannya yang demikian sulit untuk ditandingi para politikus modern, baik dunia Barat maupun dunia Timur.⁴⁰

Menurut Khaldun, terciptanya sebuah negara yang ideal, paling tidak perlu ditunjang 4 (empat) kriteria sosiologis yaitu *Pertama*, lingkungan yang sehat, udara, air, maupun tata letak bangunannya. *Kedua*, secara geografis terletak pada tempat yang strategis serta menjadi lalu lintas perdagangan dan perkembangan kebudayaan. *Ketiga*, terciptanya solidaritas sosial yang kental; ikatan suku, agama, bahasa, wilayah, maupun rasa kebersamaan senasib. *Keempat*, terletak pada geografis yang subur dan kaya akan hasil buminya.⁴¹

Bila keempat kriteria tersebut didukung oleh kepemimpinan kepala negara yang ideal, telah dimiliki pada suatu negara, maka kondisi tersebut akan mempercepat munculnya kemakmuran rakyat dan terbinanya kebudayaan yang tinggi. Ide dasar pandangan Khaldun tentang negara ideal, setidaknya terbias dari pengalaman hidupnya di Mesir yang demikian kondusif bagi terlaksananya sebuah pemerintahan ideal. Suasana kondusif tersebut dapat terlihat dari untaian bait-bait syairnya: *burung jatuh ditempat bijian di lempar, Rumah orang-orang mulia dikerumuni*.⁴²

Bila dilihat atmosfer pemikiran politik Khaldun di atas, maka dapat dikatakan bahwa ia telah memiliki warna politik yang jelas dan bernuansa filosofis tentang konsep negara, baik tentang konsep *khilafah*, *'ashabiyah*, dan proses pemilihan kepala negara. Ketika aspek-aspek ini dikembangkan secara rinci, maka dapat disimpulkan bahwa berbagai lompatan politik yang pernah dilakukannya, bukan merupakan sikap arogansi atau kemunafikan terhadap politik. Tindakan yang dilakukan sesungguhnya mencerminkan kejeniusan dan kearifannya. Hal ini dapat dilihat, dalam melakukan politiknya, ia secara sosiologis mengacu pada teori sosial (logika realistik). Ia mencoba mencermati kondisi pemerintahan waktu itu yang kurang kondusif bagi membumikan pesan ideal al-Quran dan hadis dalam kehidupan politik praktis. Konsepnya tentang negara merupakan pemikirannya yang *genuine* dan sekaligus membedakan pemikiran politiknya dengan pemikiran ilmuan lain, baik sebelum maupun sesudahnya.

Inti pemikiran Khaldun tentang konsep politik dan negara merupakan upaya menciptakan tatanan negara yang bernuansa religious yang menjamin kemashlahatan umat manusia. Bentuk negara yang ditawarkannya perlu dipahami secara majazi-historis dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan keinginan masyarakat. Manakala manusia berada pada kehidupan sosial yang demikian mengglobal, maka manusia perlu mendasarkan tindakannya pada logika realistik-religius, bukan emosional dan egosentrisnya. Jika tidak, maka semua ide tentang konsep negara ideal yang mereka inginkan akan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, tatkala melihat sikap politik Khaldun yang terkesan mendua lewat loncatan politiknya, sesungguhnya yang demikian merupakan suatu keniscayaan dalam rangka membumikan ide-ide politiknya di tengah-tengah dinamika dan kegalauan politik umat Islam waktu itu.

Selain itu, menurut Ibnu Khaldun, negara seperti makhluk hidup yang lahir, mekar menjadi tua, dan akhirnya hancur. Negara mempunyai umur seperti makhluk hidup lainnya. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa umur suatu negara adalah tiga generasi, yakni sekitar 120 tahun. Satu generasi dihitung umur yang biasa bagi seseorang, yaitu 40 tahun. Ketiga generasi tersebut, antara lain sebagai berikut:

⁴⁰ Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, New York, Harper and Row, 1971, 255

⁴¹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*....., 401-405

⁴² Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*....., 420

- a. Generasi pertama, hidup dalam keadaan primitif yang keras dan jauh dari kemewahan juga kehidupan kota, masih tinggal di pedesaan dan padang pasir.
- b. Generasi kedua, berhasil meraih kekuasaan dan mendirikan negara sehingga generasi ini beralih dari kehidupan primitif yang keras ke kehidupan kota yang penuh dengan kemewahan.
- c. Generasi ketiga, dalam tahap ini negara mengalami kehancuran sebab generasi ini tenggelam dalam kemewahan, ketakutan, dan kehilangan makna kehormatan, keberwiraan, serta keberanian.

Telaah Kritis Pemikiran Politik Ibnu Khaldun

Menyimak pemikiran Ibnu Khaldun tentu tidak bisa melepaskan pendekatan yang dilakukan tokoh tersebut. Dari sekian pemikiran tersebut, yang penulis pandang perlu untuk memberikan komentar sekaligus catatan kritis adalah terdapat dua persoalan yang mungkin jika dikontekstkan dan diimplementasikan pada zaman sekarang justru menimbulkan kontroversi dan pertentangan, atau bahkan sampai berpotensi menimbulkan konflik dan keretakan terhadap persatuan negara modern, khususnya di Indonesia yang berbasis multikultural dan multireligius, terdiri dari beragam ras, suku, budaya, dan agama, yang masing-masing mempunyai ruang privasi yang sangat sensitif untuk disinggung dan disentuh.

Pertama, Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa kriteria seorang khalifah itu tidak boleh cacat fisik, meliputi: buta, tuli atau bisu, dan juga cacat fisik lainnya. Memang dalam konteks sekarang itu bisa dikategorikan telah mengabaikan hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Perlu diketahui bahwa konteks yang dihadapi Ibnu Khaldun berbeda dengan sekarang, di mana seorang pemimpin yang dibutuhkan saat itu memang harus cakap secara fisik. Sementara kecakapan secara fisik tersebut akan sangat berpengaruh dan mendukung terciptanya stabilitas negara. Pemimpin yang cacat fisik sangat rentan terjadi pergolakan karena tidak mempunyai kewibawaan untuk memimpin banyak orang. Terlebih konteks saat itu, keberlangsungan sebuah Negara selalu terancam dan dikondisikan dalam suasana perang untuk mempertahankan eksistensinya, sehingga mau ataupun tidak mau seorang pemimpin Negara harus cakap secara fisik dan cakap dalam memimpin peperangan. Oleh sebab itu, kecakapan mutlak dibutuhkan.

Kedua, kriteria pemimpin harus dari keturunan Quraisy. Pengamatan Ibnu Khaldun melihat bahwa kaum Quraisy mempunyai kelebihan yang hampir tidak dimiliki kaum lain. Dalam sejarah terlihat betapa pesatnya perluasan daerah kekuasaan umat Islam hingga membentuk peradaban baru, dan memberikan pengaruh bagi perkembangan peradaban lainnya.

Karena itu, disinilah pentingnya menempatkan suku Quraisy di garda terdepan dalam membangun dan mempertahankan negara. Mereka merupakan simbol kekuatan dan terbentuknya *'ashabiyah* bagi bangsa Arab, sehingga peranannya sangat sentral dalam memperkokoh kekuatan Negara.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa Menurut Ibnu Khaldun, *'ashabiyah* adalah karakteristik sosial-politik tertentu yang terdapat dalam suatu suku (komunitas), dan berada pada kerangka kebudayaan desa. *'Ashabiyah* adalah kekuatan penggerak negara dan merupakan landasan tegaknya suatu negara atau dinasti. *Ashabiyah* mempunyai peran besar dalam perluasan negara setelah sebelumnya merupakan landasan tegaknya negara tersebut. Bila *'ashabiyah* itu kuat, maka negara yang muncul akan luas, sebaliknya bila *'ashabiyah lemah*, maka luas negara yang muncul relatif terbatas.

Ashabiyah bisa merupakan alat perjuangan, alat penyerang dan bertahan. Dapat pula sebagai alat penyelesaian konflik antar golongan, yakni bila konflik ini harus diselesaikan secara kekerasan. Dalam masyarakat menentang tujuan terakhir ashabiyah adalah Mulk, kekuasaan-wibawa yang pada akhirnya melemahkan kemauan agar dituruti, kalau perlu dengan kekerasan. Bilamana negara atau dinasti atau mulk tersebut telah mapan, ia akan berupaya menghancurkan 'ashabiyah.

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang negara yaitu 'ashabiyah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan bagi tercapainya kekuasaan dan kelangsungan politik. Mulai dari awal gerakan untuk membangun kekuatan, kemudian berlanjut pada tercapainya kemenangan, bahkan sampai dalam tahap menjaga stabilitas sosial negara tersebut.

Sebaliknya, memudarnya ikatan 'ashabiyah akan berpotensi melemahkan ketahanan negara tersebut dari gempuran musuh maupun dari gejolak internal, serta perubahan zaman yang semakin berkembang juga berperan dalam menguji dan memberi perlawanan yang sangat berat juga

Negara yang terbentuk didasari pada 'ashabiyah, biasanya berumur tiga generasi, yakni sekitar 120 tahun. Satu generasi dihitung umur yang biasa bagi seseorang yaitu 40 tahun. Oleh karena itu, kunci utama dalam menjaga stabilitas, kontinuitas, dan kelangsungan suatu negara itu terletak pada elemen bangsa tersebut terutama pemimpinnya dalam menjaga kelangsungan keterikatan 'ashabiyah tersebut.

Daftar Rujukan

- Abdullah Enan, Muhammad. 2013. *Biografi Ibnu Khaldun*. Terj. Machnun Husein. Cet I. Jakarta: Zaman
- Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun. 2014. *Mukaddimah*, terj. Masturi Irham dkk Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Khudhairi, Zainal. 1987. *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, Pent. Ahmad Rafi" Usmani. Bandung: Penerbit Putaka
- Al-Maududi, Abul A'la. 1995. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan
- Anshori, Subkhan. 2014. *Filsafat Islam Antara Ilmu dan Kepentingan*. Jakarta: Pustaka Azhar
- Hitti, Philip K. 1971. *History of the Arabs*. New York: Harper and Row
- Ilham, M. 2016. *Konsep Ashabiyah dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jurnal Politik Profetik Volume 04, No. 1
- Iqbal, Muhammad & Nasution, Amin Husein. 2015. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Khaldun, Ibnu. 2011. *Muqaddimah*. Terj. Masturi Irham, Cet. I. Jakarta: Pustaka Alqausar
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 1996. *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*. Jakarta: Gema Insani Press
- Mahdi, Muhsin. 1971. *Ibn Khaldun Philosophy of History*, Chicago, The University of Chicago Press
- Mansur. 2007. *Model Kekuasaan Ibnu Khaldun*. UNISA, Vol. XXX, no 66.
- Pulungan, J. Suyuthi. 1997. *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: LsiK
- Raliby, Osman. 1965. *Ibn Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*, Jakarta: Bulan Bintang
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran Kehidupan bernegara era modern*. Jambi: Sultan thaha press.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-press

- Sofiuddin, Muh. 2015. *Pandangan Ibnu Khaldun Tentang Manusia dan Masyarakat*. Yogyakarta: UGM
- Syam, Firdaus. 2000. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Watt, W. Montgomery. 1972. *Islamic Philosophy and Theology*, Edinburg: Edinburg University Press
- Wulpiah. 2016. *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar*. Jurnal Asy-Syar'iyah, Vol. 1, No. 1
- Zainuddin, Abdul Rahman. 1992. *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.